



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 29 April 2020

Halaman: 2

40 Persen KK Yogya Terima Bansos

UMBULHARJO (MERAPI) - Sekitar 40 persen dari total Kepala Keluarga (KK) di Kota Yogyakarta akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) jaring pengaman sosial dampak Covid-19. Penerima bansos harus tepat sasaran sehingga diterima warga terdampak dan tidak terjadi penerima ganda.

"Kalau ditotal sekitar 40 persen dari KK di Yogya akan mendapatkan total bansos dari pusat, provinsi dan kota," kata Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Selasa (28/4).

Menurutnya, dari hasil identifikasi ada sekitar 50.000 KK dari total 138.000 KK di Kota Yogyakarta akan mendapatkan bansos dari pusat, provinsi dan kota. Total bantuan dari itu meliputi berbagai

bantuan yang sudah ada selama ini yang berdasarkan pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kemensos seperti Program Keluarga Harapan, bantuan sembako atau bantuan pangan nontunai. Selain itu keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS) dan para karyawan yang dirumahkan maupun karena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Rencananya, lanjut Heroe,

bantuan akan diberikan dalam bentuk uang nontunai yang masuk rekening bank. Bansos diberikan dalam jangka waktu yang berbeda-beda yakni jangka 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun.

Tapi pihaknya belum dapat memastikan nominal bansos yang akan diberikan. Penyaluran melibatkan perbankan.

"Untuk nominalnya kami belum tahu pastinya. Baru Kamis besok bisa dipastikan," ujarnya.

Ia menyatakan saat ini data penerima bansos sedang diverifikasi dan validasi di tingkat kelurahan. Data penerima disinergikan dengan berbagai program bantuan dari pemerintah pusat agar tidak terjadi

duplikasi penerimaan bansos. Diakuinya verifikasi data penerima bansos yang ditangani pusat, provinsi dan kota tidak mudah.

"Kami masih menunggu dari pusat dan provinsi untuk sinkronisasi data sasaran dan perlakuannya. Pusat, provinsi dan kota sasarannya di mana," tambah Heroe.

Sebelumnya Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Agus Sudrajat mengaku pematangan data penerima bansos itu memerlukan waktu yang tidak sebentar.

Mengingat harus memastikan kembali data nama dan alamatnya tidak mendapat double bantuan. Itu karena selama ini banyak program bantuan dari pemerintah pusat

yang berdasarkan pada DTKS.

"Penerima tidak boleh mendapat double bantuan. Jadi data yang sama sekali belum terima bantuan apapun. Tapi masuk dalam data DTKS. Kami harus memastikan karena banyak bantuan dari pusat selama ini," papar Agus.

Sementara bagi keluarga miskin yang tidak masuk data KSJPS akan ada bantuan dari Pemkot Yogyakarta dan provinsi.

Dia mengutarakan penerima bantuan di luar DTKS di Kota Yogyakarta berdasarkan pada KSJPS. Data KSJPS akan dihimpitkan dengan DTKS, yang belum masuk, bantuan akan diampu dari kota dan provinsi. (Tri)-d

Instansi				
1.	☐			
2.	☐			
3.				
4.	☐	Netral	☐	Biasa
			☐	Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005